

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2018



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari(DPMD/N).

Dengan telah tersusunnya LKjIP DPMD/N ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LkjiP DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian DPMD/N telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP) ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, Januari 2019

KEPALA DPMD/N KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan dan Wewenang	1
	C. Dasar Hukum	3
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD	5
	B. MISI	8
	C. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	10
	A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA	10
	B. HASIL PENGUKURAN KINERJA	11
	C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA	12
	D. REALISASI ANGGARAN	22
BAB IV	PENUTUP	26
Lampiran		
	1. Pengukur Kinerja	
	2. Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari diaturkan Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.78 Tahun 2018 pasal 4 Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah ;

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset nagari;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggaran Dinas; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Rencana Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 Dan telah ditetapkan pula Peraturan Bupati No Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/nagari tahun 2016-2021.

Adapun Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam dilihat pada tabel berikut;

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA**

TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Nagari</i>	1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan Nagari	1. Mengotimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, tranparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik	1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan undang-undang desa, 2. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Nagari, 3. Meningkatkan pelanayan publik yang inovatif dan berkualitas bagi masyarakat Nagari
			2. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Nagari dan Masyarakat dalam memanfaatkan potensi dan Aset Nagari	1. Mendorong percepatan pembangunan nagari dengan kemandirian
			3. Meningkatkan sinergitas seluruh elemen masyarakat	1. Memperkuat Kelembagaan Nagari dan masyarakat untuk

			dalam membangun nagari	mendukung pelaksanaan Pembangunan Nagari
			4. Memonitoring dan Mengevaluasi Status Perkembangan Nagari	1. Menetapkan nagari Yang status perkembangannya perlu ditingkatkan. 2. Bekerjasama /Kooedinasi dengan Lintas OPD dan Kecamatan 3. Mensikronkan Program dan Kegiatan dengan Lintas OPD terkait
			5. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari	1. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Nagari
	2.	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang Fungsi dan Peranan Badan Usaha Milik Desa/Nagari BumNag) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.	1. Fasilitasi, sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Nagari/(BumNag)
			2. Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan	2. Fasilitasi pembinaan usaha ekonomi Mikro Perdesaan
			3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	3. Penataan dan Penguatan kerjasama Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
	3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan,	1. Penyediaan dokumen perencanaan,

		Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	pelaporan dan keuangan yang berkualitas, peningkatan kualitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang
--	--	--	--	---

B. MISI

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) menyelenggarakan Misi ke 5 dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu “**Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong** “ dengan Tujuan yaitu **Meningkatkan Kualitas tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari** dengan Sasaran yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari**. Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Misi dan Visi Bupati Terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) juga melakukan sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Barat serta mensinkronkannya dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian) yaitu tujuan dan Sasaran Strategis ke 4 yaitu **Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik , jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang**

efektif, transparan dan akuntabel. Sesuai pula dengan arah Kebijakan Rencana Strartegi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu “**Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran**”

C. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju	70 Nagari
		Persentase Nagari yang Menetapkan RKP Tepat waktu	30 %
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	75 %

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2018 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 2 Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja yang didukung oleh 11 program, Yaitu 4 Program di sekretariat Dinas , 7 Program yang dilaksanakan Oleh tiga Bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Sasaran Strategis dan Indicator kinerja tersebut adalah sebagai berikut;

1. Strategis Ke I ; Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, dengan Indikator Kinerja yaitu:
 - 1.1. Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju
 - 1.2. Persentase Nagari yang Menetapkan RKP Tepat waktu
2. Strategis ke II : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Yaitu;
 - 2.1. Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator

kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut:

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dari hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PERINGKAT
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju	70 Nagari	70 Nagari	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang Menetapkan RKP Tepat waktu	30 %	45.57%	152%	Sangat Tinggi

2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	75 %	80,76 %	107 %	Sangat Tinggi
----	-------------------------------------	--	------	---------	-------	---------------

C. ANALISA DAN CAPAIAN KINERJA

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 Dan telah ditetapkan pula Peraturan Bupati No Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/nagari tahun 2016-2021. Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/nagari tahun 2016-2021 makan ditetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan Target dan Realisasi sebagai berikut ;

1. Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari;

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJM	TARGET 2018	REALISASI 2018	KET.
1.	Jumlah Nagari dengan Status Berkembang dan Maju	70 Nagari	70 Nagari	100%	
2.	Persentase Nagari yang Menetapkan RKP Tepat Waktu	30 %	30 %	45,57%	

Sasaran Strategis 1 dengan Indikator Kinerja yang Pertama yaitu Jumlah Nagari dengan Status Berkembang dan Maju dengan realisasi 100 % yaitu nagari dengan status Berkembang 51 Nagari dan nagari dengan status Maju 19 Nagari. Nagari yang mengalami peningkatan Status IDM (Indek Desa Membangun) dari tahun sebelumnya adalah 40 Nagari. Nagari dengan status IDM tetap

sebanyak 39 Nagari. Dengan kata lain tidak ada nagari yang mengalami penurunan status. Evaluasi Perkembangan Status Indeks Desa Mandiri Tahun 2018 adalah Kondisi desa tahun 2017, adapun hasil evaluasi seperti data berikut ;

**TABEL EVALUASI PERKEMBANGAN STATUS IDM 2016/2017
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	NAMA KEC./ DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2016	2017	KET.	2016	2017	KET.
1	3	4	5	6	7	8	9
	SULIKI						
1	KURAI	0,5878	0,5687	TURUN	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
2	SUNGAI RIMBANG	0,5661	0,674	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
3	TANJUANG BUNGO	0,5684	0,65	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
4	SULIKI	0,5907	0,7257	NAIK	TERTINGGAL	MAJU	MENINGKAT
5	LIMBANANG	0,6301	0,6253	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
6	ANDIANG	0,6168	0,6173	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	GUGUAK						
7	GUGUAK VIII KOTO	0,7482	0,7668	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
8	VII KOTO TALAGO	0,7797	0,7876	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
9	SUNGAI TALANG	0,5433	0,6375	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
10	KUBANG	0,5909	0,6476	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
11	SIMPANG SUGIRAN	0,4826	0,5373	NAIK	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	MENINGKAT
	PAYAKUMBUH						
12	KOTO BARU SIMALANGGANG	0,6983	0,7252	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
13	TAEH BUKIK	0,5948	0,657	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
14	SIMALANGGANG	0,6627	0,6587	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
15	SUNGAI BARINGIN	0,6745	0,7341	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
16	PIOBANG	0,7192	0,7243	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
17	TAEH BARUAH	0,6991	0,6994	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
18	KOTO TANGAH SIMALANGGANG	0,6732	0,7246	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
	LUAK						
19	SIKABU-KABU TJ ARO PD. PJG	0,4966	0,611	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
20	MUNGO	0,6495	0,7152	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT

NO	NAMA KEC./ NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2016	2017	KET.	2016	2017	KET.
1	2	4	5	6	7	8	9
21	SUNGAI KAMUYANG	0,6727	0,7184	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
22	ANDALEH	0,6645	0,6525	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	HARAU						
23	TARAM	0,6399	0,8146	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
24	SOLOK BIO-BIO	0,5352	0,6549	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
25	TARANTANG	0,6651	0,624	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
26	BUKIK LIMBUKU	0,5765	0,5143	TURUN	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
27	HARAU	0,4772	0,5497	NAIK	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	MENINGKAT
28	BATU BALANG	0,6325	0,629	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
29	SARILAMAK	0,7672	0,747	TURUN	MAJU	MAJU	TETAP
30	GURUN	0,623	0,614	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
31	LUBUAK BATINGKOK	0,5779	0,6248	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
32	KOTO TUO	0,6837	0,6943	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
33	PILUBANG	0,4595	0,55	NAIK	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	MENINGKAT
	PANGKALAN KOTO BARU						
34	MANGGILANG	0,6133	0,626	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
35	TANJUANG BALIK	0,6225	0,6857	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
36	GUNUANG MALINTANG	0,6274	0,6976	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
37	PANGKALAN	0,6641	0,7724	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
38	KOTO ALAM	0,5739	0,5686	TURUN	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
39	TANJUANG PAUAH	0,6114	0,6597	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	KAPUR IX						
40	MUARO PAITI	0,6561	0,6884	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
41	KOTO BANGUN	0,6265	0,6122	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
42	LUBUAK ALAI	0,63	0,6849	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
43	KOTO LAMO	0,4728	0,5154	NAIK	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	MENINGKAT
44	DURIAN TINGGI	0,5964	0,7006	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
45	SIALANG	0,571	0,5994	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
46	GALUGUA	0,4966	0,5405	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
	GUNUANG OMEH						
47	PANDAM GADANG	0,5779	0,6375	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT

NO	NAMA KEC./ NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2016	2017	KET.	2016	2017	KET.
1	2	4	5	6	7	8	9
48	KOTO TINGGI	0,6625	0,636	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
49	TALANG ANAU	0,5638	0,7049	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
	LAREH SAGO HALABAN						
50	LABUAH GUNUANG	0,6724	0,6716	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
51	BATU PAYUANG	0,7101	0,7657	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
52	AMPALU	0,5635	0,6176	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
53	BUKIK SIKUMPA	0,6119	0,664	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
54	BALAI PANJANG	0,6432	0,6227	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
55	HALABAN	0,6383	0,6976	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
56	TANJUANG GADANG	0,5875	0,5652	TURUN	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
57	SITANANG	0,579	0,6325	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
	SITUJUAH LIMO NAGARI						
58	SITUJUAH BATUA	0,6573	0,7533	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
59	SITUJUAH LADANG LAWEH	0,5582	0,6562	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
60	TUNGKA	0,6243	0,6198	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
61	SITUJUAH BANDA DALAM	0,6481	0,7554	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
62	SITUJUAH GADANG	0,6272	0,7162	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
	MUNGKA						
63	JOPANG MANGANTI	0,5534	0,6125	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
64	SIMPANG KAPUAK	0,5444	0,6024	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
65	MUNGKA	0,6529	0,6811	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
66	TALANG MAUA	0,6933	0,6906	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
67	SUNGAI ANTUAN	0,5993	0,599	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	BUKIK BARISAN						
68	MAEK	0,6129	0,6138	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
69	BANJA LOWEH	0,5683	0,6002	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
70	BARUAH GUNUANG	0,6122	0,6562	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
71	SUNGAI NANIANG	0,6113	0,6137	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
72	KOTO TANGAH	0,6012	0,6171	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
	AKABILURU						
73	SARIAK LAWEH	0,5908	0,7367	NAIK	TERTINGGAL	MAJU	MENINGKAT

NO	NAMA KEC./ NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
		2016	2017		2016	2017	
1	2	4	5	6	7	8	9
74	KOTO TANGAH BATU HAMPA	0,6993	0,7187	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
75	BATU HAMPA	0,5945	0,6578	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
76	SUAYAN	0,5166	0,6037	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
77	SUNGAI BALANTIAK	0,5286	0,6	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
78	PAUAH SANGIK	0,5671	0,6241	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
79	DURIAN GADANG	0,6102	0,7127	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
		48,3909	51,8827				

	2016	2017
MAJU :	5	19
BERKEMBANG :	41	51
TERTINGGAL :	29	9
SANGAT TERTINGGAL:	4	0
TOTAL NAGARI	79	79

Kategori Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nagari ini disebut juga sebagai nagari Pra Sembada. Katergori Nagari Berkembang atau disebut juga Nagari Madya adalah Nagari Potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan. Dan Kategori Nagari Tertinggal atau biasa juga disebut Nagari Pra Madya adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Indikator Kedua yaitu Persentase Nagari yang menetapkan RKP Tepat waktu dengan Target Kinerja 30 % (24 Nagari dari 79 Nagari

yang ada) terealisasi 45,57% (36 Nagari dari 79 Nagari yang menetapkan RKP nya tepat waktu) dengan kata lain realisasi capaian kinerjanya yaitu 152%. Adapun ke 36 Nagari tersebut adalah ;Nagari Pandang Gadang, Nagari Maek, Nagari Baruah Gunung, Nagari Koto Tengah, Nagari Sungai Rimbang, Nagari Suliki, Nagari Limbanang, Nagaru Andiang, Nagari Kurai, Nagari VII Koto Talago, Nagari Guguak VIII Koto, Nagari Simpang Sugiran, Nagari Simpang Kapuak, Nagari Koto Tengah Batu Hampa, Nagari Suayan, Nagari Batu Hampa =, Nagari Pauh Sangik, Sungai Balantiak, Koto Baru Simalanggang, Simalangga, Piobang, Koto Tengah Simalanggang, Sungain Baringin, Ampalu, Halaban, Situjuh Gadang, Taram, Lubuak Batingkok, Gurun, Bukik Limbuku, Pangkalan, Manggilang, Tanjung Balik, Koto Bangun dan Nagari Muaro Paiti.

Dari 36 (Tiga Puluh Enam) Nagari yang menetapkan RKP nagari Tahun Anggaran 2019 tersebut 14 (Empat Belas) Nagari yang menetapkan sesuai amanat ketentuan perencanaan nagari sedangkan 22 (Dua Puluh Dua) nagari menetapkan RKP nagari menjelang berakhirnya Tahun 2018 yang lalu.

Diantara permasalahan relatif terlambatnya penetapan RKP tersebut antara lain disebabkan karena keterlambatan proses musyawarah nagari dan persetujuan bersama Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

2. Strategis ke 2 yaitu Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat ;

NO .	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJM	TARGET 2018	REALISASI 2018	KET.
1.	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	75 %	75 %	80,8 %	

Pada Tahun 2018 Jumlah Bumrag/ Bumdes yang aktif adalah ditargetkan 75% , terealisasi 80,8% yaitu dari 52 Bumrag terbentuk 42 Bumrag yang aktif dengan capai kinerja 107%.

Berikut ini Nama-nama BumNag/Bumdes, Surat Keterangan (SK) Pembentukan, Produk Unggulan / Jenis Usaha dan Status Masing-masing Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 yaitu ;

No	Kecamatan/Desa	Nama Bumdes	Sk Pengelola	Tanggal Pendirian	Perdes/Perdes Bersama	Jenis Kegiatan Usaha	Status	
							Aktif	Tidak Aktif
1	3	4	9	10	11	12	13	
	Suliki							
1	Kurai	Lereng Gunuang	SK No 30 Tahun 2015	2 Sept 2015	Perna No. 5 Tahun 2015	Depot Air Minum	1	-
2	Tanjung Bungo	Saiyo Sakato	SK No. 14 Tahun 2016	28 Januari 2016	Perna No. 4 Tahun 2016	Kios Nagari		1
3	Suliki	Suliki Jaya	39 thn 2017	22 mei 2017	Perna No. 6 Tahun 2016	Ikan Segar	1	
						Kuliner		
4	Sungai Rimbang	Batang Sinama	45 Tahun 2018	16 Agustus 2018	42 Tahun 2018	Peternakan	1	
	Lareh Sago Halaban							
5	Ampalu	Mandiri Sejahtera		05 Juli 2014	No 83 Tahun 2014	Simpan Pinjam	1	
						Jasa Keuangan		
6	Labuah Gunuang	BumNag Labuah Gunuang	No. 29 Tahun 2017		No. 04 Tahun 2017	Gula Semut	1	
7	Halaban	Halaban Terpadu	Des-17	2017	No. 3 Tahn 2017	Pengerajin Songket	1	
8	Tanjuang Gadang	Tanjung Gadang Bersatu	No. 27 Tahun 2017	2017	No. 9 Tahun 2017	Kasium / Dolomit	1	
9	Balai Panjang	Balai Panjang			No. 8 Tahun 2018	Kebun Sereah Wangi	1	
	Luak							
10	Mungo	Mungo Mekar Madani		2016	No. 40 Tahun 2016	Perikanan		1
					No. 5 Tahun 2016			
11	Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	No. 48 Tahun 2016	30 Okt 2016	No. 05 Tahun 2016	Lembaga Keuangan Nagari (KMN)	1	
						Pariwisata Pemandian Alam		
12	Tanjung Haro Sikabu-kabu	Sago Sejahtera	SK No. 51 thn 2017	4 AGUST 2017	No. 3 Tahun 2017	Konveksi	1	
						Bank Mini	1	
13	Andaleh	Gamand Jaya	SK No. 19 thn 2017		No. 4 Tahun 2017	Bank Mini	1	

No	Kecamatan/Desa	Nama Bumdes	Sk Pengelola	Tanggal Pendirian	Perdes/Perdes Bersama	Jenis Kegiatan Usaha	Status	
							Aktif	Tdk Aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Gunung Omeh							
14	Pandam Gadang	Saraso	No. 14 Tahun 2016	25 Januari 2016	No. 4 Tahun 2016	Bank Mini	1	
16	Talang Anau	Salendang Anau	No. 4 Tahun 2017	19 Mei 2017	No. 4 Tahun 2017	Bank Mini	1	
	Bukit Barisan							
17	Sungai naniang	Limo Saiyo	No. 42 thn 2016	30 Desember 2016	No. 5 th 2017	Distributor Gas	1	
18	Koto Tengah	Palo Darek	No.26 SK-KHT/2017	10-Mei-17	No. 4 th 2017	Bank Mini	1	
						ATK dan Photocopy		
19	Banja Loweh	Banjar Sakato	No. 4 thn 2018	19 Juli 2018	No. 5 th 2018	Peternakan Sapi		1
20	Maek	Zulkarnaik	No. 7 thn 2017	09 Jan 2017	No. 4 th 2017	Pemasaran Pupuk	1	
	Payakumbuh							
21	Sungai Beringin	BUMNag Sungai Beringin	No. 15 Tahun 2017	3 April 2017	No. 15 Tahun 2017	Budi Daya Ikan	1	
22	Koto Tengah Simalanggang	Koto Tengah Simalanggang		12 April 2017	No. 5 TAHUN 2016	Pasar Nagari	1	
23	Piobang	BumNag Piobang Jaya		2017	No. 4 Th 2017	Pegang Gadai	1	
						Wisata Alam		
24	Koto Baru Simalanggang	BumNag Koto Baru Simalanggang		Juli 2017	No. 4 Tahun 2017	Pegadaian	1	
25	Simalanggang	Simalanggang		September 2017	No. 5 Tahun 2017	Perdagangan dan Pertanian	1	
26	Taeh Baruah	Taeh Baruah		Des 2017	No. 5 Thn 2017	Perdagangan dan Pertanian	1	
27	Taeh Bukik	Taeh Bukik		Des 2017	No. 3 Thun 2017	Pariwisata		1
	MUNGKA							
28	Simpang Kapuak	Lubuak Bulan Perdana		8 maret 2017	No. 6 tahun 2017			1
29	Mungka	BumNag Mungka		2017	No. 9 tahun 2017	Perdagangan	1	
30	Sungai Antuan	Nasya Mandiri		6 Des 2017	No. 9 tahun 2017			1

No	Kecamatan/Desa	Nama Bumdes	Sk Pengelola	Tanggal Pendirian	Perdes/Perdes Bersama	Jenis Kegiatan Usaha	Status	
							Aktif	Tdk aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Guguak							
31	Guguak VIII Koto	Delko Mandiri	SK NO.115 TAHUN 2016	23-Des-16	No. 6 tahun 2016	Rencana Produksi Kerupuk dari Bahan Lambu	1	
						Rencana Pemasok Barang Harian untuk Konsumen		
						Pengadaan Sembako		
32	Simpang Sugiran	Sigiran Mandiri	SK No. 35 Tahun 2017	17-Mar-17	No. 3 Tahun 2017	Jasa Keuangan	1	
						Kios Agrobisnis		
33	Kubang	7 Nan Tungga	SK NO. 7 TAHUN 2017	27-Des-16	No. 5 Tahun 2017	Pengemuka n sapi	1	
						Home Industri		
						Rekening listrik		
34	Tujuh Koto Talago	Mandiri	SK NO. 13 TAHUN 2017	29 Februari 2017	No. 5 Tahun 2017	Kios Agrobisnis	1	
						Home Industri		
35	Sungai Talang	BumNag Sungai Talang		2017	No. 5 Tahun 2017	Kios Agrobisnis		1
						TTP		
	Harau							
36	Taram	Sato Sakaki		4 Mei 2017	No. 4 Tahun 2017	LPN	1	
37	Solok bio-bio	Sobio Jaya Mandiri	SK No. 30 Tgl 14 Juli	14 Juli 2017	Perna No , 5 Tahun 2017	Pupuk Organik	1	
						Jasa Layanan Internet		
38	Harau	Harau Mandiri	SK No. 51 Tahun 2017	14 Nov 2017	No. 3 Tahun 2017	Jasa Penyewaan	1	
39	Pilubang	Salingka Bukik	SK No.7 Tahun 2018	19 Maret 2018	o.2 Tahun 2018	Jual Saprodi	1	
40	Tarantang	Maju Bersama	05 Juni 2018	09 Mei 2018	No. 4 tahun 2017	Gas Subsidi		1
	Situjuh Limo Nagari							
41	Situjuh Banda Dalam	Beringin Sakti	SK No. 30 thn 2017	24 agust 2017	No. 3 tahun 2017	Perdagangan	1	

No	Kecamatan/Desa	Nama Bumdes	Sk Pengelola	Tanggal Pendirian	Perdes/Perdes Bersama	Jenis Kegiatan Usaha	Status	
							Aktif	Tdk aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	1
42	Situjuah Batua	Situjuah Batua Mandiri	No. 30 Tahun 2017	24 Agust 2017	3 Tahun 2017	Perdagangan	1	
Akabiluruh								
43	Pauh Sangik				No. 3 Tahun 2017	Perikanan	1	
44	Sariak Laweh	PALITO NAGARI	49 Tahun 2017	3 April 2017	Perna No. 4 Tahun 2017	Foto Copy` ATK	1	
45	Sungai Balantiak	Raudhatul Hasanah		2017	No. 4/2017	Bank Mini Barang Harian	1	
46	Batu Hampa	Putera Menara		2017	No. .../2017	Peternakan Kambing Pembibitan	1	
47	Suayan	Nagari Suayan Sasuai	63 tahun 2017	9 nov 2017	No. 5/2017	Foto Copy` ATK	1	
48	Durian Gadang	Durga Jaya		2017	No. 5/2017	Percetakan	1	
Kapur IX								
49	Galugua	Ikhlas Berkarya Makmur Bersama		2017	No. 05 Tahun 2017	Pamsimas Pengumpul Produksi Pertanian Gambir		1
50	Muaro Paiti	Muaro sejahtera	No. 14 Tahun 2018	Jan 2018	No. 01 Tahun 2018	Gas Subsidi	1	
51	Koto Lamo	Koto Gambir Sejahtera		28 Des 2017	No. 05 Tahun 2017	Kebun Gambir		1
	Pangkalan							
52	Gunung Malintang	Harapan Basamo	No. 43 Tahun 2018	24 April 2018	No. 04 Tahun 2018	Dagang Bahan Bangunan	1	
							42	10
							80,8%	

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ nagari merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Melaksanakan 11 Program dan 50 Kegiatan, Sumber Dana APBD 2018, Alokasi Anggaran yaitu Rp. **4.740.039.447.-** dan Realisasinya pada yaitu Rp. **3.968.251.968.-** dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/.NAGARI

NO. REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.	BELANJA	4.740.039.447	4.088.831.800	86,26%
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.270.087.245	2.161.675.392	95,22%
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.270.087.245	2.161.675.392	95,22%
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.469.952.202	1.927.156.408	78,02%
5.2.1.	Belanja Pegawai	497.876.660	201.272.800	40,43%
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.911.325.542	1.671.618.708	87,46%
5.2.3.	Belanja Modal	60.750.000	54.264.900	89,32%

Realisasi Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Anggaran 2018 secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut ;

PROGRAM /KEGIATAN	DPA AWAL (Rp.)	DPA PERGESERAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	
DINAS PEMEBERDAAYAAN MASYARAKAT					
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	548.023.056	598.023.613	95,56	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.630.000	3.630.000	2.277.000	62,73
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.680.840	32.681.397	28.673.511	87,74
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.250.000	2.250.000	2.225.000	98,89

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	DPA PERGESERAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	269.100.000	272.100.000	251.410.000	92,40
5 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja	3.950.000	3.950.000	3.940.000	99,75
6 Penyediaan alat tulis kantor	9.558.150	9.558.150	9.557.500	99,98
7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.634.620	7.634.620	7.634.600	100
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000	4.500.000	4.499.000	99,98
10. Penyediaan Bahan Logistik kantor	4.400.000	4.400.000	4.360.000	99,09
11. Penyediaan makanan dan minuman	14.829.850	14.829.850	14.815.000	99,90
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	199.789.596	239.789.596	239.376.702	99,83
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	227.836.250	227.836.250	124.276.898	54,55
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	37.000.000	37.000.000	30.941.400	83,63
2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	12.500.000	12.500.000	12.098.500	96,79
3 Pengadaan Mebeleur	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	96.500.000	96.500.000	0	
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	70.736.250	70.736.250	70.136.998	99,15
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	14.000.000	14.000.000	14.000.000	97,82
Pendidikan dan Pelatihan Formal	14.000.000	14.000.000	13.695.000	97,82
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.023.400	7.023.400	6.994.000	99,68
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.033.800	5.033.800	5.021.200	99,75
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester	601.800	601.800	601.800	100
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.387.800	1.387.800	1.371.000	98,79
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	796.157.429	796.157.429	475.615.000	59,74
1. Pembedayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	401.363.408	401.363.408	127.754.500	31,83

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	DPA PERGESERAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	25.718.074	25.718.074	22.713.800	88,32
3. Penyelenggaraan Deseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	20.953.199	20.953.199	16.932.000	80,81
4. Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	16.841.622	16.841.622	15.345.200	91,11
5. Pembinaan PKK	279.798.569	279.798.569	259.720.000	92,82
6. Temu Wicara Lembaga Adat Se Kab.Lima Puluh Kota	51.482.530	51.482.530	33.149.500	66,10
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	176.290.503	176.290.503	148.010.149	83,96
1. Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	28.810.075	28.810.075	26.600.500	92,33
2. Fasilitas Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	21.361.509	21.361.509	18.218.149	86,28
3. Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	46.884.822	46.884.822	26.364.500	56,23
4. Perlombaan Desa dan Kelurahan	79.234.097	79.234.097	76.827.000	96,96
PROGRAM PENINGKATAN PARTIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	205.038.130	205.038.130	190.985.058	93,15
1. Pembinaan kelompok Masyarakat Membangun Desa	35.325.003	35.325.003	35.029.968	99,16
2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	18.865.230	18.865.230	15.822.000	83,87
3. Pemberian Stimulan Penbanguan Desa	40.925.148	40.925.148	37.726.600	92,18
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	33.953.714	33.953.714	30.762.600	90,60
5. Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari	25.664.170	25.664.170	25.651.400	99,95
6. Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	50.304.835	50.304.835	45.992.490	91,43
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	229.857.977	229.857.977	203.219.500	88,41
1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	41.069.895	41.069.895	34.521.000	84,05
2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	56.059.757	56.059.757	48.560.000	86,62
3. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	47.379.530	47.379.530	42.305.500	89,29
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	47.253.650	47.253.650	44.816.500	94,84
5. Rapat Koordinasi Wali Nagari	38.095.145	38.095.145	33.016.500	86,67
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	156.117.125	156.117.125	133.668.490	95,31

LKjIP DPMD/N TAHUN 2018

PROGRAM /KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	DPA PERGESERAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
1		2	3	4	5
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	31.279.895	31.279.895	28.759.000	91,94
2	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	40.883.360	40.883.360	40.585.000	99,27
3	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	29.632.400	29.632.400	27.171.490	98,53
4	Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan	54.321.470	54.321.470	37.153.000	68,39
PROGRAM PENATAAN DESA		40.930.225	40.930.225	40.751.500	99,56
1	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Nagari	27.026.900	27.026.900	26.849.500	99,34
2	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Nagari	13.903.325	13.903.325	13.902.000	99,99
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN		18.677.550	18.677.550	18.472.500	98,90
1	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Nagari Bagi Skala Kabupaten dan Nagari	18.677.550	18.677.550	18.472.500	98,90
		2.419.951.645	2.469.952. 202	1.927.158.408	78,02

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, tahun 2018 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2021, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2018.

Tujuan penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk media pertanggungjawaban kepada publik, sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah dan sarana introspeksi diri yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap 2 (Dua) sasaran Strategis yang diukur dengan 3 (Tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari rata-ratanya lebih dari 100% (112%) sehingga dapat dikategorikan berhasil dengan **Sangat baik**.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 ini diharapkan

dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditanda tangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan Bupati Lima Puluh Kota dengan sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2018. Dengan adanya Indikator yang tidak tercapai itu disebabkan oleh antara lain;

Adapun keberhasilan yang dicapai selama Tahun Anggaran 2018 antara lain adalah ;

1. Juara III Lomba TTG Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

1.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Demi untuk Peningkatan Pencapaian Kinerja di masa yang akan datang perlu mensinkronkan antara Indikator Kinerja yang tercatum pada Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dengan Kedudukan ,Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Pemilihan Kegiatan yang akan mendukung Sasaran Strategis juga tak kalah penting untuk jadi perhatian dari semua pihak pelaksana kegiatan.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dapat menggambarkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari pada Tahun 2018.